

## **PURITANISME DAN FUNDAMENTALISME DALAM ISLAM TRANSNASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA**

**Rendy Adiwilaga**

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Bale Bandung (UNIBBA)  
rendyadiwilaga@gmail.com

***Abstract:** In fact, the movement of Islamisme has special portion in the political world. It not only presents as a potential power, this movement is also there as a good bargain to define and colorise the political climate. The movement not only exists as antithesis to the old concept created by the western, but also it appears as a movement to influence the colors of the political states in many countries, particularly in the newly independent states after the World War II. This present article explains how, historically, the Ideology of Islam Transnational as the ideology that spread over in Indonesia after reformation movement builds a new hegemony. It also describes how this ideology influences the Pancasila, especially the existence of Pancasila as the national concensus.*

***Keyword:** Islamism, Ascetic, Fundamentalism, Pancasila*

---

### **Pendahuluan**

Sulit untuk kita ingkari bahwa dewasa ini, gejolak euforia Islamisme sebagai paham, bahkan mimpi dalam sistem ketatanegaraan, sangat laris sebagai sebuah komoditas hangat terlebih untuk diperbincangkan. Pasca bergulirnya aksi massa dengan mengusung nama gerakan seperti 411 dan 212 pada akhir tahun 2016, sebagian besar masyarakat mulai memberi perhatian lebih pada gerakan Islamisme. Front

Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendadak mendapatkan panggung megah, dan ormas-ormas lain sejenis pun semakin lantang dalam memperlihatkan geliatnya perihal ditetapkannya nilai-nilai khilafah dalam keseharian masyarakat.

Masyarakat pun semakin dibuat bingung. Disisi lain, bagi para pendukung Islamisme, fenomena ini merupakan angin segar yang mampu merestunya untuk berbicara apapun

tentang isu keIslaman, termasuk di dalamnya hal-hal yang sebelumnya tabu untuk diperbincangkan seperti pendirian negara Islam dan lain sebagainya. Disisi lain pula, masyarakat yang merasa mewakili kebhinekaan dan toleran, dibuat resah dengan isu-isu non elementer yang digulirkan ormas-ormas Islam baru seperti penurunan baligho di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, pembubaran acara peribadatan acara keagamaan non-Islam, *sweeping* besar-besaran yang dilakukan beberapa ormas terkait penggunaan atribut natal dan lain sebagainya, hingga dewasa ini terjadi peristiwa penolakan pengurusan jenazah akibat pilihan politik. Masyarakat terpecah ke dalam dua kutub yang saling berseberangan dan saling melakukan penolakan serta pembenaran. Walhasil, kondusifitas dalam kehidupan bermasyarakat cukup terganggu, dan disintegrasi dikhawatirkan mengemuka jika fenomena ini tersebut dibiarkan. Peristiwa dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama jelas menjadi momentum tersendiri bagi para

pegiat gerakan Islamisme di Indonesia. Seakan dibangunkan dari tidur panjang, *domino effect* dari peristiwa tersebut ialah bangkitnya satu persatu suara-suara ormas serta lembaga keagamaan tertentu dalam menyuarkan tuntutan. Hal ini menarik mengingat vokalnya organisasi pegiat kekhilafahan dan syariat Islam baik pada masa orde baru maupun pasca reformasi bergerak senyap dan mengendap-endap. Menarik juga bahwa FPI yang sebelumnya kurang mampu mengisi ruang di relung hati sebagian besar masyarakat, mendadak dipuja-puja dan pimpinannya menjadi figur yang paling berpengaruh dalam aksi-aksi massa yang sudah bergulir. Namun perlu diperhatikan bahwa fenomena tersebut tidak mendadak muncul seperti buih dalam ombak, tetapi ditopang melalui peristiwa panjang yang tengah dan telah bergulir. Lantas, apakah gerakan Islamisme atau Islam transnasional ini merupakan pengaruh eksternal baik, atau sebaliknya, malah menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi Pancasila dilihat dari perspektif ideologis?

### **Mengupas Islamisme dan Islam Transnasional**

Terdapat perdebatan tersendiri ketika kita memahami terminologi Islamisme dan Islam Transnasional, khususnya jika dihadapkan pada konteks geografis dan historis. Sejatinnya, Islam sendiri merupakan suatu pemahaman yang datang dari luar, mengingat masyarakat Nusantara sendiri sebelumnya lekat dengan konsep Animisme dan Dinamisme. Bahkan bisa dibilang, beberapa pemikiran ulama-ulama pendiri dua ormas besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah (1912) dan Nahdhatul Ulama (1926) dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islam dari luar. Selain melalui pembelajaran Ulama langsung ke jazirah Arab, jauh sebelum itu, konsepsi Islam sudah dikenal masyarakat pelabuhan melalui hubungan perdagangan. Kaum Arab, Gujarat, dan Tiongkok sekalipun berperan besar dalam proses penyebaran Islam di bumi nusantara.

Ide Islam yang menggambarkan tidak hanya sebagai konsep Ilahiah melainkan juga konsep yang utuh dalam sendi politik dan kenegaraan,

sejatinnya mulai muncul pada awal abad ke 17. Kemajuan Barat yang disusul dengan kemunduran dunia Islam, selain memberikan pukulan keras, pada akhirnya juga menjadi bahan evaluasi bagi para pemikir Islam, untuk melakukan perubahan dan perbaikan di berbagai sendi. Abad ke-18 menjadi titik tolak pergerakan Islam untuk melakukan perubahan. Berdasarkan catatan Fealy dan Bubalo (2007: 30), gerakan pemikiran Islam dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1787) di Arabia Tengah, disusul trio Jamaludin Al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Rasyid Ridha (1865-1935) pada abad 19 dan 20.

Menurut Jon Armajani (2012, 1), setidaknya ada empat hal yang dijadikan pijakan oleh kalangan Islamis: *Pertama*, prinsip-prinsip keislaman harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun kolektif. *Kedua*, Islam adalah agama yang menekankan pentingnya keyakinan, sedangkan keyakinan agama lain mengandung kesalahan atau keabsahan terbatas. *Ketiga*, hukum-

hukum tradisional Islam harus mengatur masalah relasi seksual. *Keempat*, budaya barat dan sekular hanya mempromosikan budaya konsumerisme dan hidup bebas yang bertentangan dengan Islam.

Abdul Wahab sendiri mengawali dinamika pergerakan pemikiran Islam melalui konsepsi Wahabi. Menurut El Fadl, Wahabi berkeyakinan bahwa solusi bagi kemunduran umat Islam adalah dengan pemahaman dan penerapan literal teks sebagai satu-satunya sumber otoritas yang sah. Karenanya, setiap usaha menafsirkan teks secara historis dan sosiologis, terlebih filosofis, dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Tidak ada multitafsir dalam agama, tidak ada pluralisme, dan autentik berarti melaksanakan bunyi teks secara literal. Untuk menarik simpati masyarakat muslim, kelompok Wahabi banyak menggunakan simbol-simbol Salafi. Kelompok inipun lebih menyukai untuk disebut kelompok "Salafi" dengan jargon kembali kepada "*Al salaf Al Shalih*", yakni kembali kepada Islam versi mereka. (El Fadl, 2003: 24).

Wahabi sendiri pada prosesnya kemudian memelopori Hassan Al-Banna untuk membangun Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Berdasarkan telaah Abdurrahman Wahid dalam bukunya "Ilusi Negara Islam", Tongkat estafet perjuangan Hassan Al-Banna kemudian diteruskan oleh agitator handalnya, yakni Sayyid Qutb. Sayangnya, Sayyid Qutb dieksekusi oleh junta militer Mesir pada tahun 1966. Dominasi militer mendorong eksodusme besar-besaran sebagian aktivis Ikhwanul Muslimin (IM) ke Arab Saudi dan Eropa. Muhammad Qutb, adik kandung Sayyid Qutb, kemudian menjadi dosen di King Abdul Aziz University Jeddah dan mengajar Osama Bin Laden sebagai mahasiswanya. (Wahid, 2009: 82).

Pecahan lain dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang cukup memberikan pengaruh besar hingga kini, dimotori oleh Taqiudin Al-Nabhani (1909-1997). Taqiudin menilai gerakan Ikhwanul terlalu moderat. Sampai akhirnya, Taqiudin mendirikan Hizbut Tahrir di Yerussalem Timur. Berangkat dari konflik Israel-Palestina, Taqiudin

memandang konflik tersebut sebagai cerminan pertarungan dunia Islam versus Non Islam. Dan untuk memenangkan pertarungan tersebut, diperlukan sebuah sistem Khilafah Islamiyah Internasional, yang diawali dari teritori Afrika bagian barat hingga ujung timur Asia Tenggara.

Menurut Bubalo, Fealy, dan Mason (2012: 7), aktivisme gerakan-gerakan Islamisme pada dasarnya terbagi menjadi dua arus, yakni arus utama dan arus militan. Islamisme arus utama yang dimaksud ialah kaum Islamis yang ingin mendirikan negara Islam sebagai tujuan utama mereka, namun dengan pembangunan sistem melalui reformasi masyarakat secara bertahap, dari bawah ke atas. Sederhananya, arus utama bersedia 'mengalah' dengan mengikuti sistem pemilihan langsung yang dianut demokrasi untuk perlahan membangun negara Islam yang kuat seperti halnya *Adalet ve Kalkinma Partisi* (Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP) pimpinan Erdogan di Turki, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di

Indonesia. Beda halnya dengan arus militan yang merefleksikan sebuah sikap yang keras, pesimis, dan tidak sabar terhadap perubahan. Arus militan dipelopori oleh Sayyid Qutb. Qutb sendiri meyakini bahwa Islamisasi masyarakat hanya mungkin terwujud manakala tatanan politik, ekonomi, dan sosial yang ia sebut sebagai keadaan jahilliyah (kebarbaran) digulingkan secara total. Bahkan dalam karyanya yang terkenal, *Ma'alim Fi Al Thariq* (penunjuk jalan), Qutb menciptakan 'apa yang mesti dilakukan' ala Islamis yang mirip dengan gagasan Lenin mengenai perebutan kekuasaan secara revolusioner.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Adiwilaga dalam makalahnya, "Quo Vadis Gerakan Islamisme di Indonesia", Evolusi dari Islamisme militan juga kemudian melahirkan wajah-wajah baru yang lebih mengerikan, yakni terorisme yang diwakilkan Al-Qaeda dan dewasa ini *Islamic State of Iraq and Sjam* (ISIS). Keduanya secara terbuka menyatakan perang terhadap Amerika Serikat sebagai induk semang dari demokrasi dan

kapitalisme. Beberapa aksi teror bahkan telah dijalankan, mulai dari peristiwa 9/11, hingga aksi teror kontemporer seperti penembakan di Arizona. Evolusi dari arus militan ini juga menghadirkan wajah baru dengan tema ‘pembebasan negeri muslim’. Beberapa diantaranya aktif meneriakkan isu-isu Palestina dan lain sebagainya. Beberapa arus utama bahkan mulai mengambil perhatian pada isu-isu ini, entah sebagai kepedulian murni atau sebagai upaya penggalangan persatuan melalui pelemparan isu *common enemy*.

Arus militan tersebut nyatanya melahirkan gerakan-gerakan puritan serta fundamental. Menurut El Fadl, kelompok puritan adalah mereka yang secara konsisten dan sistematis menganut absolutisme, berpikir dikotomis, dan idealistik. Mereka tidak kenal kompromi, cenderung puris dalam artian tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang dan berkeyakinan bahwa realitas pluralistik merupakan kontaminasi terhadap autentisitas (El Fadl, 2006: 29-32). Sedangkan Esposito, membagi Fundamentalisme pada tiga

pengertian. Pertama, yakni semua usaha untuk kembali pada kepercayaan dasar. Dalam konteks masyarakat Islam ialah usaha kembali pada Al-Quran dan Hadits sebagai model hidup normatif. Kedua, pengertian yang sangat dipengaruhi gerakan protestanisme Amerika. Fundamentalisme adalah gerakan protestanisme abad 20 yang menekankan penafsiran injil secara litera; sebagai hal fundamental bagi kehidupan dan ajaran Kristen. Ketiga, istilah untuk menyebut suatu hal yang terkait dengan aktivitas politik, ekstrimisme, fanatisme, terorisme, dan anti-Amerikanisme. (Esposito, 1996: 17-18).

### **Cikal bakal Islam Transnasional di Indonesia**

Di Indonesia sendiri, Islamisme (sebagai embrio Islam Transnasional) bukanlah barang baru. Tjokroaminoto dengan Sarikat Islamnya, nyatanya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islamis luar seperti Jamaludin Al-Afghani dan pemikir Islam pembaruan lainnya. Setali tiga uang dengan Tjokroaminoto, KH

Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Islamis luar. Namun Tjokroaminoto masih mengakui demokrasi sebagai produk perjuangan tanpa murni meneriakkan khilafah, sedangkan Ahmad Dahlan murni pada perlawanan terhadap takhayul, *bid'ah*, dan *churafat*, atau dengan kata lain dalam konteks substansial pemurnian agama sahaja.

Lantas apa yang membedakannya dengan pemahaman Islam Transnasional dewasa ini? Islam Transnasional merupakan gerakan Islam yang hendak memberlakukan formalisasi Islam dalam tata hukum kenegaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Rohmanu dalam [alwishihab.com](http://alwishihab.com) juga mengutarakan bahwa Islam Transnasional merupakan nama lain dari Islam radikal, Islam kanan, fundamentalisme Islam, dan Islam puritan. Kelompok-kelompok puritan mempunyai variasi nama dan gerakan, akan tetapi karakter keberagamaan mereka mempunyai benang merah yang sama. Di Indonesia, kelompok tersebut

diwakili oleh Gerakan Tarbiyyah yang terwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama'ah Salafi, Front Pembela Islam (FPI), Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI), dan lain sebagainya (Turmudi & Sihbudi, 2005: 11)

Otoritarianisme Soeharto selama 32 tahun nyatanya banyak menghadirkan sentimen-sentimen khusus pada gerakan maupun partai yang berbau Islam. Pasca dikerucutkannya partai-partai Islam menjadi partai tunggal bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), disusul kerusuhan-kerusuhan yang diagendakan dan dituduhkan pada tokoh Islam seperti peristiwa Tanjung Priok tahun 1982, mengakibatkan daya jelajah organisasi Islam menyempit. Dipersempitnya ruang gerak tersebut dikombinasikan dengan pengkultusan Pancasila versi orde baru yang fanatis mengakibatkan gerakan Islam jauh dari kata kritis. Hal tersebut lah yang melatarbelakangi Natsir mendirikan

Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), yang kegiatannya melaksanakan pengajian di kampus-kampus. Natsir bahkan mampu menginspirasi berdirinya organisasi kemahasiswaan bernama KAMMI, yang lambat laun menjadi inisiator Partai Keadilan pasca tumbanganya Orde Baru dan kini berevolusi menjadi partai Islam besar bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tidak hanya itu, Hizbut Tahrir melalui Abdurrahman Al-Baghdadi dan Mustofa bin Abdullah bin Nuh juga diam-diam melancarkan strategi dakwah di kampus-kampus besar di Indonesia sejak tahun 1980-an. Berikut merupakan pendapat dari Natsir yang melandasi gerakan Tarbiyyah dalam mencapai Negara Islam:

“Seringkali orang bertanya: bagaimana toean hendak mengatoer negara dengan Islam. Apakah Qoer’an Toean itu tjoekoep oentoek mengatoer semoa oeroesan *staat* dalam abad ke 20 ini? mengatoer *staat* jang modern jang boekan sedikit sangkoet paoetnja, amat *geomliceerd* dan soelit roemit? Kita berkata: memang kalaoe kita boeka Qoer’an tak akan bertemoe didalamnja *handleiding* oentoek merantjang *begrooting* negeri, tak

ada di dalamnja tjara-tjara mengatoer *contingenteering*, tak ada di dalamnja peratoeran valuta dan *devizenregelling* dan jang sematjam itoe. Tak akan bersoea dalamnja tjara mengatoer laloe lintas *verkersregeling* “menoeroet Islam”, tak ada cara memasang antene “menoereot Qoer’an”, tak ada peratoeran *evacuatie* dan *luchbescherming* “menoeroet soennah” dan 1001 matjam hal jang sematjam itoe lagi jang mendjadikan *staat* modern kita ini soelit roemit, bersangkoet paoet dan *gecompliceerd* itoe. Tidak! Ini sematjam toedoehan tentoe tidak bisa dan tidak poela diatoer dengan wahjoe ilahi kekal dan tak beroebah. Sebab ini semoa berkenaan dengan hal kedoeniaan jang selaloe berpoetar dan beroebah menoeroet tempat zaman dan keadaan” (Natsir, 1940: 553).

Natsir menilai bahwa peminggiran Islam dalam falsafah kenegaraan adalah sebuah kekeliruan. Sekulerisme yang menghendaki pemisahan antara agama dan negara menjadi hal yang paling Natsir tentang. Sayangnya, sejarah mencatat Natsir dan kendarannya, yakni Masyumi, kalah telak dan tenggelam dalam kedigdayaan Nasionalisme dan Pancasila. Dan hal tersebut semakin diperparah dengan kecemburuan dan kecurigaan Soeharto pada



perkawinan Islam dan politik praktis. Wajar jika kemudian Natsir dan para penerusnya bergerilya dalam ranah dakwah dan pendidikan.

Pasca tumbangya rezim Orde Baru, geliat gerakan keislaman semakin mengemuka, KAMMI – sebagai representasi Tarbiyyah kontemporer- bahkan ikut menginisiasi tumbangya Soeharto dari kursi presiden. HTI pun semakin terang-terangan meneriakkan Islam *kaffah* sebagai sistem formal. Diluar itu, pendirian organisasi masyarakat khususnya yang berhaluan Islam juga deras mengalir, salah satunya ialah Front Pembela Islam (FPI) yang berdiri 4 bulan setelah tumbangya Soeharto. HTI dan FPI merupakan dua lembaga yang sangat aktif menghendaki penetapan Syariat Islam sepenuhnya dalam tatanan hukum dan sistem pemerintahan Indonesia. Pada tabligh akbar FPI tahun 2002, bahkan disepakati oleh seluruh elit agar FPI memiliki sikap untuk menuntut Syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 1945 dengan menambahkan “kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Sejalan dengan FPI, HTI juga semakin aktif menyebarkan selebaran-selebaran tentang pentingnya Kilafah Islam, busuknya kapitalisme, dan *Mudharat* nya Pancasila. Beda hal dengan PKS yang menjalankan strategi moderat, dengan ikut berkompetisi pada pemilihan umum langsung dan mendukung serta mengakui pemerintahan Nasionalis. Sayang, kegemilangan PKS luntur karena kasus elit nya yang terjerat permasalahan korupsi, gratifikasi, bahkan tindak amoral.

Meminjam istilah dari Abdurrahman Wahid, Kelompok Puritan mengklaim sebagai pewaris tunggal kebenaran dan karenanya muslim yang berbeda dianggap kurang Islami atau bahkan kafir. Seperti pendahulunya, yakni DDII, kelompok ini gencar melakukan infiltrasi ke dalam lembaga pendidikan, instansi pemerintah, masjid, maupun ormas-ormas Islam, tak terkecuali Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Hingga akhirnya, Muhammadiyah menerbitkan SK PP Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/B/2006 yang

berisi tentang penolakan terhadap infiltrasi tersebut, pun halnya dengan NU melalui forum *Bahtsul Masa'il* nya (Wahid, 2000: 44).

### **Islam Transnasional dan Resistensi Pancasila**

Dalam berbagai peristiwa dan catatan sejarah, Soekarno berkali-kali mengemukakan bahwa Pancasila merupakan konsepsi ideal yang merangkul seluruh lapisan masyarakat, golongan, ras, dan agama menuju persatuan Indonesia yang mapan. Walau melalui desakan dari berbagai arah untuk menjadikan Indonesia berasaskan Islam, Soekarno tak bergeming. Soekarno melalui “Dibawah Bendera Revolusi”, yang disadur dalam buku “Soekarno dan Modernisme Islam” karya Ridwan Lubis, mengemukakan mengapa Islam tidak dijadikan dasar negara secara formal. Menurutnya, Islam tidak dijadikan sebagai dasar negara (*formeel verklaring*) di Indonesia. Yang dipentingkan Islam bukan *formeel verklaring*, namun “.. ia minta satoe *staat* jang betoel-betoel menjala api keIslaman di dalam dada oemat”. (Lubis, 2010:

204). Artinya, konsepsi Islam tidak perlu disematkan dalam sampul fisik yang nampak, namun cukup dinyalakan melalui komposisi atau isi dari sebuah konsep general seperti Pancasila, dan pengamalannya lah yang utama.

Islam pun sejatinya tidak dilepaskan sepenuhnya oleh Soekarno sebagai penggagas utama Pancasila. Walau tidak secara resmi dicantumkan konsep teologi Islam sebagai landasan utama dasar negara, tetapi paham ketauhidan menjadi puncak tertinggi dari perbagai pandangan keTuhanan. Pertimbangan lain mengapa Islam bukan sebagai pegangan formal ialah dengan pertimbangan kebhinekaan. Soekarno, dan juga tokoh nasionalis lain mempertimbangkan nasib pemeluk agama lain. Dengan dipaksakannya Syariat Islam pada masa itu, Soekarno dan para *founding fathers* lainnya mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi yang berkepanjangan. Dengan diakuinya Pancasila sebagai *gentlement agreement* oleh pemuka Islam pada masa itu, maka permasalahan konsepsi kenegaraan

sudah dinyatakan final, sudah dianggap sebagai kesepakatan bersama dalam bentuk konsensus nasional, ditempatkan sebagai alat mencapai tujuan, sekaligus tujuannya itu sendiri.

Sebagai sebuah konsensus nasional, idealnya Pancasila perlu dihormati dan dijalankan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa terkecuali penduduk Indonesia di luar negeri. Nilai-nilai ketuhanan, nasionalisme, demokrasi dalam bentuk musyawarah mufakat, serta sosialisme sepatutnya menjadi pegangan hidup, *way of life* dari masyarakat. Kesepakatan tersebut sifatnya menyeluruh dan tertutup untuk ideologi diluar kesepakatan nasional tersebut. yang menjadi permasalahan adalah ketika konsensus nasional tersebut berusaha dihilangkan oleh oknum tertentu, jelas hal tersebut dikhawatirkan mampu melahirkan disintegrasi dalam rupa dan corak yang lama.

Armanjani (2012) dalam bukunya, "*Modern Islamist Movements: History, Religion, and Politics*", menjabarkan tentang gambaran ideologi yang hendak

dibangun pegiat Islamis, diantaranya ialah: (1) Syariat harus mengatur seluruh aspek dari kehidupan di negara-negara muslim, (2) setiap pemerintahan harus mampu mewujudkan muslim yang paripurna, yaitu muslim yang patuh menjalankan rukun Islam dan memiliki keyakinan yang sesuai dengan rukun Iman, (3) pemerintahan dapat dicapai melalui mekanisme demokrasi atau melalui sistem monarki yang dipimpin seorang *amir* yang dianggap sebagai baying-bayang Tuhan di bumi, (4) pemerintahan yang berdasarkan Islam tersebut harus memberikan dukungan finansial dan politik terhadap sekolah dan perguruan tinggi Islam, serta membumihanguskan keberadaan sistem pendidikan lainnya. (5) pemerintahan harus menjamin tejanya basis moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti hal pakaian, pergaulan, minuman, kebudayaan, sistem ekonomi, dan lain-lain.

Dalam konteks yang telah diperbincangkan di muka, Wahabi jelas dapat dikategorikan sebagai paham yang mengancam ketahanan

ideologi bangsa, mengingat Wahabi, dengan corak gersang layaknya padang pasir dan tanpa puisi, tidak mentolerir pluralisme. Padahal kita ketahui bersama bahwa pluralisme adalah nyawa utama dari Pancasila yang memayungi majemuknya masyarakat Indonesia. Kelompok puritan dan fundamentalis ini, seperti

apa yang dikemukakan Syafii Maarif dalam artikelnya “Masa Depan Islam Indonesia”, anti terhadap demokrasi, akan tetapi mereka bersikap kontradiktif dengan memakai lembaga negara untuk menyalurkan cita-cita politiknya.

Tabel 1. Berikut merupakan rentetan geliat kegiatan Islamisme di Indonesia

| <b>Tahun</b> | <b>Tokoh</b>  | <b>Peristiwa</b>         | <b>Deskripsi</b>   |
|--------------|---|--------------------------|--|
| 1825         | Imam Bonjol   | Perang Padri             | Tokoh Islam yang baru pulang dari Timur Tengah, mendorong masyarakat Adat untuk menerapkan Syariat Islam serta menghilangkan praktek-praktek budaya di luar agama seperti perjudian. |
| 1911         | Samanhudi dan Tjokroaminoto                           | Pendirian Syarikat Islam | Syarikat Islam bermetamorfosa menjadi Partai politik pertama yang melebarkan hegemoninya secara luas di Nusantara  |
| 1945         | M. Natsir, Kasman Singodimedjo, Ki Bagoes Hadikoesomo | Sidang BPUPKI            | Penetapan Syariat Islam sebagai dasar Pancasila  |
| 1945-1960    | M. Natsir   | Pembentukan Masyumi      | Partai Masyumi berdiri sebagai partai golongan Tarbiyyah yang menghendaki penegakan Islam sebagai dasar negara   |

|           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
|           |  |  | melalui arus utama, namun kemudian dibubarkan akibat diduga terlibat pemberontakan PRRI-Permesta  |
| 1949-1962 | S.M Kartosoewirjo  | Diproklamirkannya Negara Islam Indonesia (NII)   | NII dideklarasikan sebagai sikap kekecewaan terhadap pemerintah nasionalis tentang kooperatifnya mereka dengan kaum kafir (Belanda) hingga akhirnya ditumpas tahun 1962   |
| 1967      | M. Natsir  | Berdirinya Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang kemudian menginisiasi berdirinya KAMMI | DDII dibentuk melalui gerilya masjid-mesjid lembaga pendidikan tinggi dengan menekankan ajaran Tarbiyyah  |
| 1980      | Abdurrahman Al-Baghdadi dan Mustofa bin Abdullah bin Nuh | Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)   | HTI merupakan organisasi transnasional dengan tujuan utama pan-islamisme (khilafah Islamiyah), HTI juga melancarkan gerilya dakwah di kampus-kampus   |
| 1998      | -  | Orde Baru runtuh, KAMMI mendirikan PKS   |   |
| 1999      | Rizieq Shihab  | Front Pembela Islam (FPI) berdiri  | FPI dikategorikan sebagai bagian dari gerakan politik Islam dengan dasar pertimbangan, Pada tabligh akbar FPI tahun 2002, disepakati oleh seluruh elit bahwa FPI memiliki sikap untuk menuntut Syariat Islam dimasukkan pada pasal 29 UUD 1945 dengan |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | menambahkan “kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.<br><br>(Wahid, 2000, 44). |
|--|--|--|--|

Sumber: Olahan Penulis.

Selepas tenggelamnya PKS sebagai representasi Islamisme arus utama di Indonesia akibat tindak pidana dan perdata oknum elit nya, nyatanya FPI dan HTI yang pada periode sebelumnya kurang mendapatkan tempat dalam relung hati masyarakat, pasca terjadinya dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, nampak mendadak menjadi bintang di berbagai media. Adanya sentimen-sentimen khusus selepas pilpres 2014 terhadap pemerintah terpilih juga menjadikan hal-hal yang berkaitan dengan kealpaan pemerintah, terlebih yang bersifat sensitif dan dogmatis, menjadikan permasalahan kasus dugaan penistaan agama menjadi sebuah tuntutan kuat yang layak dipertimbangkan. Tak ayal peristiwa aksi massa muncul hingga berjilid-jilid, salah dua yang paling besar ialah aksi 411 dan aksi 212. Yang lebih mengkhawatirkan, aksi kedua

diduga ditunggangi oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana makar.

Tindak tanduk FPI dan HTI serta beberapa ormas susulan kini sudah tidak ditolak secara dominan lagi. Setiap aksi yang dilakukan, selalu dilindungi oleh opini-opini sebagian masyarakat yang “mentolerir” tindakan-tindakan yang sebagian masyarakat lain menganggapnya intoleran. Beberapa peristiwa seperti pembubaran peribadatan, penurunan baligo di Universitas Kristen, hingga *sweeping* atribut natal, selalu menjadi perdebatan hangat dalam tubuh masyarakat. Hal ini tak lain dan tak bukan dikarenakan ada masyarakat yang *agree* dan *disagree* terhadap sikap yang diemban ormas fundamentalis dan puritan tersebut. situasi tersebut diperparah dengan bebasnya media baik formal maupun informal dalam berbagi berita yang entah *hoax*, entah pula nyata. Pada akhirnya, setiap dari kita yang selalu

berbagi berita, secara sadar atau tak sadar, adalah media itu sendiri.

Sebagian masyarakat bahkan sudah mulai terang-terangan membicarakan konsepsi negara Islam dengan kerap kali menyertakan Saudi Arabia dan Turki sebagai percontohan. Beberapa oknum bahkan memainkan isu Suriah dengan tagar *save Aleppo* sebagai penggriringan opini bahwa kasus Suriah adalah murni pertarungan hegemoni Sunni dan Syiah, sebagai upaya membangun sentimen khusus terhadap kalangan tertentu. Masyarakat semakin memandang Pancasila sebagai ideologi usang yang sama sekali tidak memperbaiki kehidupan perekonomian mereka. pada akhirnya kemudian, janji-janji kenikmatan surgawi dalam sajian keagamaan lambat laun memenangkan pertarungan ideologis ini. jika sebagian masyarakat mulai terpengaruh dan semakin irasional, jelas ini merupakan ancaman besar bagi integrasi dan eksistensi Pancasila.

### **Kesimpulan**

Ketegangan-ketegangan tersebut pada dasarnya merupakan buah dari tiadanya kesamaan persepsi terhadap permasalahan karena kesenjangan wawasan pengetahuan dan keagamaan, ataupun memang disebabkan sikap mental moral keberagaman yang eksklusif. Kultur pendidikan keagamaan yang mulai mengendur, disertai urgensi kehadiran guru yang berkurang, mengakibatkan masyarakat, khususnya masyarakat muda menerima referensi-referensi keagamaan dan wawasan pengetahuan dari sumber-sumber tak bertanggung jawab. Masyarakat banyak menerima referensi keagamaan, khususnya hal-hal terkait penelaahan kitab yang mengesankan eksklusifitas dengan meminggirkan pluralitas. Semua dilahap tanpa kajian ulang baik dari segi historis maupun dimensi ruang. Pada akhirnya, penafsiran sempit ayat-ayat tertentu mengakibatkan sebagian masyarakat reaktif. Kesenjangan inilah yang kiranya melatar belakangi masyarakat terbelah menjadi dua kutub yang saling berlawanan satu sama lain.

Adanya upaya medesak agama ke level negara sebagai dasar perjuangan Islamisme, dalam beberapa konteks tidak lah perlu menjadi perdebatan mengingat nilai-nilai agama, -khususnya Islam- telah tersublimasi bahkan sejak Pancasila lahir sebagai sebuah ideologi maupun konsep yang mapan. Hakikat beragama seperti keyakinan mutlak terhadap eksistensi Tuhan diikuti dengan pengalaman sebagai manusia yang percaya akan kebesaran Tuhan, jelas diatur dalam sila pertama diikuti oleh sila-sila berikutnya yang bersifat kontinyu. Namun ketika Pancasila dibenturkan dengan dasar-dasar pijakan Islamisme yang bersifat tertutup seperti pendiskreditan keabsahan agama yang lain sebagai prinsip negara, penegakkan hukum satu agama yang bersifat menyeluruh (termasuk pada penganut kepercayaan diluar agama penguasa), diaturnya permasalahan privat hingga hal sekecil-kecilnya (pakaian, pergaulan, kebudayaan), sampai “pembumihangusan” sistem pendidikan lain di luar Islam, jelas hal tersebut menjadi ancaman tersendiri

bagi eksistensi Pancasila. Mengingat Pancasila sendiri mengedepankan toleransi, keberagaman, dan kesetaraan hukum.

Dalam perspektif lain, Jose Casanova dalam *Public Religions in the Modern World (2004)* mencatat gejala mendesak agama ke level negara justru dianggap sebagai dampak dari proses sekularisasi baik dalam pengertiannya sebagai proses “kemunduran beragama” (*religious decline*) maupun “Privatisasi” yang jelas hendak meminggirkan agama dalam wacana publik. (Fleming: 2006). Dalam arti lain, fenomena kemunculan gerakan Islam Puritan dan Fundamentalis bisa disebabkan oleh kejenuhan sebagian masyarakat akan sekularisasi yang berlarut-larut dan tidak menghasilkan *impact* yang besar dalam kehidupan privat.

Pancasila yang hanya dimaknai sebagai formulasi normatif (*of the text*) juga dimungkinkan menjadi penyebab tergerusnya sakralitas dari Pancasila itu sendiri. Yang padahal idealnya, seperti apa yang dikemukakan Sunyoto Usman, Pancasila juga seharusnya menjadi formulasi teoritis yang dapat



diidentifikasi dengan prinsip-prinsip akademik (*of the context*). Menyambung pendapat Sunyoto. Dalam usaha menciptakan situasi semacam itu, yang pertama harus dihindari adalah jangan sampai ada kelompok yang merasa dirinya paling tahu tentang Pancasila. Sayangnya kondisi itulah yang kini terjadi, dan para pengklaim pewaris tafsir Pancasila tersebut lah yang mengisi ruang oposisi kaum Islamis Fundamentalis Puritan. Sehingga akan menjadi penting bahwa, pada masa yang akan datang, yang dibutuhkan bukan memobilisasi massa untuk menerima Pancasila, tetapi yang terpenting justru memobilisasi kesadaran bahwa di dalam Pancasila terkandung kekuatan yang merekatkan hidup bermasyarakat (Usman dalam Amal dan Armaid, 1996: 83)

Penguatan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat kini merupakan suatu keniscayaan yang wajib hukumnya. Pengaruh-pengaruh ideologi luar seperti Wahabisme, Puritanisme, dan Fundamentalisme jelas menjadi sebuah ancaman besar bagi ketahanan ideologi bangsa jika

kita masih konsisten menghormati konsensus nasional bernama Pancasila. Konsepsi Pancasila yang telah memetakan dan mempertimbangkan kemajemukan masyarakat Indonesia dalam payung persatuan, menurut hemat penulis masihlah *valid* untuk diperjuangkan. *Goodwill* dari pemerintah berupa pematangan strategi pemutakhiran dan pengamalan pengajaran Pancasila semurni-murninya pada seluruh lapisan masyarakat, disertai ketegasan Pemerintah menyikapi organisasi-organisasi fundamentalis dan Puritan sejatinya merupakan kunci untuk menekan dinamika-dinamika politik yang sedikit banyak ini, cukup merepotkan dan menunda proses pembangunan.

Kalaupun para kaum Islamis kurang sudi untuk memalingkan wajah sepenuhnya pada Pancasila, setidaknya kaum Islamisme -dalam konteks ini, siapapun yang memperjuangkan *khilafah* sebagai sistem negara- melakukan internalisasi terhadap gagasan yang hendak dikembangkan. Selagi kaum Islamis terus berkubang pada apa yang disebut Asghar Ali Engineer

sebagai “ketidakjelasan metafisika-teologis (*metaphysico-theological obfuscations*)” dan hanya bermodal *ghirah* dan bungkus kulit saja dalam berjuang, para penggagas jelas akan mengalami kesulitan dalam mendoktrin gagasannya bagi para penganut nasionalis, sosialis, maupun penganut ideologi “legal” lain di Indonesia. Selagi gerakan Islamisme amnesia terhadap sejarah, khususnya tentang gambaran awal kedatangan Islam yang “membahayakan” saudagar kaya Mekkah akibat komposisi gagasan yang banyak berbicara tentang pembebasan dan keadilan yang sejatinya merugikan kaum saudagar (Engineer, 2009: 8-9), Islamisme akan selalu berseberangan dengan kaum yang mengklaim diri sebagai nasionalis-nasionalis sejati di Indonesia.

Para pemuka Islamisme Indonesia juga perlu melihat ke belakang, khususnya dalam perspektif kajian historis lokal. *Gentlement agreement* terhadap Pancasila, sekali lagi merupakan sebuah perjuangan yang masih *valid* untuk dilakukan. Selagi beberapa oknum fundamentalis dan

puritanis terus merongrong Pancasila, terlebih dengan bungkus Islam yang eksklusif melalui *sweeping-sweeping* dan tindak intoleran. Sampai kapanpun gerakan Islam tidak akan bergerak kemana-mana. Masyarakat yang menempati ruang berlawanan terhadap para Islamis sampai kapanpun tidak akan membuka diri terhadap ide ide brilian Islamisme jika fundamentalis dan puritanis terus dibiarkan. Bisa dikatakan, peristiwa-peristiwa dewasa ini merupakan pertarungan penting wajah Islamisme di bumi nusantara. Diterima sepenuhnya, atau ditolak sama sekali sebagai sebuah konsep.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul dan Armaidly Armawi. 1996. Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Armanjani, Jon. 2012. *Modern Islamist Movements: History, Religion, and*

- Politics*. United Kingdom: Willey-Blackwell.
- El Fadl, Abou. 2003. *Cita dan Fakta Toleransi Islam*. Bandung: Mizan.
- Engineer, Asghar Ali. 2009. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esposito, Jhon L. 1996. *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*. Bandung: Mizan.
- Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. 2007. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Fealy, Greg, Anthony Bubalo dan Whit Mason. 2012. *PKS dan Kembarannya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir, dan Turki*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Fromm, Erich. 1972. *Psychoanalysis and Religion*. New York: Yale University Press.
- Hidayat, Komaruddin. 2014. *Kontroversi Khilafah: Islam, Negara, dan Pancasila*. Bandung: Mizan.
- Intan, Benyamin Fleming. 2006. *"Public Religion" and the Pancasila-Based State of Indonesia: An Ethical and Sociological Analysis*. New York: PeterLang Publishing.
- Kartosoewirjo. S.M. (1999). *Al-Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia* S.M. Kartosoewirjo. Jakarta: Darul Falah.
- Lubis, Ridwan. 2010. *Sukarno dan Modernisme Islam*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Natsir, Mohammad. *Persatuan Agama dan Negara*. Pandji Islam No. 29, 22 Juli 1940.
- Noor, Deliar. (1992). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900- 1942*. Jakarta: LP3Es.
- Saiffudin. (2011). *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*. *Jurnal Analsis*. 11(1). 17-32
- Soekarno. 2015. *Islam Sontoloyo*. Bandung: Segarsy.
- Syaifullah. (1997). *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Grafity Press.
- Syaikhu, Achmad. (2012). *Pergulatan Organisasi Islam dalam Membendung Gerakan*

- Ideologi Islam Transnasional.  
*Jurnal Falasifa*. 3(1). 115-133.
- Tjokroaminoto, H.O.S. 1966. Islam dan Sosialisme. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia.
- Tri Prasetyo, Bayu. (2012). Gerakan Islam Politik Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah Pasca Keruntuhan Turki Utsmani. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional UNDIP*. 1(1). 271-290.
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi. 2005. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.
- Wahid, Abdurrahman. 2009. Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika-The Wahid Institute-The Maarif Institute.
- Wasito. (2016). Gerakan Sosial Modern Masyarakat Islam di Indonesia. *Jurnal Tribakti*. 27(2). 248-266